



Realisasi PBB Baru Tercapai Rp8,5 M

Tahun 2014 Pemkot Yogya Targetkan Rp46,7 Miliar

YOGYA, TRIBUN - Semester pertama 2014, penerimaan pajak bumi bangunan (PBB) Kota Yogyakarta yang sudah masuk baru mencapai Rp8,5 miliar. Padahal, target yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk 2014 sebesar Rp46,7 miliar. Rendahnya pencapaian ini diduga karena masyarakat masih menunda pembayaran pajak hingga batas akhir yang ditentukan.

PBB merupakan sektor yang menyumbang pendapatan terbanyak di Kota Yogyakarta. Tahun 2013 lalu, realisasi mencapai Rp 44,1 miliar dan menjadi pendapatan ketiga terbanyak setelah pajak perhotelan dan pemasukan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"PBB salah satu sektor penyumbang signifikan untuk pajak daerah. Realisasi untuk 2013 mencapai Rp44,1 miliar dan untuk 2014 ditargetkan Rp46,7 miliar, hingga akhir Mei realisasinya Rp8,4 miliar."

KADRI RENGONO
Kepala DPDPK Kota Yogyakarta

membayarkan PBB saat mendekati batas akhir pembayaran, sehingga realisasi pada saat ini masih rendah. Meskipun realisasi hingga pertengahan tahun baru mencapai Rp8,5 miliar, Kadri optimistis target tahun ini bisa terealisasi.

Menurut dia, untuk 2014 jumlah Surat Pajak Terutang (SPT) yang diserahkan ke masyarakat sebanyak 91,509 lembar dengan nilai Rp51 miliar.

Meningkatkan kesadaran dan juga memberikan panutan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran pajak tanpa harus menunggu batas akhir, Pemkot Yogyakarta mengadakan Pekan Pembayaran PBB Kota Yogyakarta 2014.

Dalam acara ini diundang 305 Wajib Pajak yang memiliki jumlah ketetapan senilai Rp5,2 miliar. Wajib Pajak tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, aparat pemerintah, pengusaha, dan masyarakat yang memiliki ketetapan di atas Rp500 ribu.

"Tujuannya adalah memberikan panutan atau keteladanan kesadaran membayar pajak," kata Kadri.

Dalam pembayaran pajak ini, Pemkot bekerja sama dengan Bank BPD DIY hingga ke tingkat kecamatan. Selain itu, pembayaran juga bisa melalui kelurahan. "Di wilayah sudah ada yang memulai, seperti di kelurahan. Sedangkan yang BPD hanya sampai tingkat kecamatan," kata Kadri.

Jangan Ditunda

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Titik Sulastrri, mengatakan, Pemkot mengimbau agar masyarakat jangan menunda hingga batas waktu terakhir dalam pembayaran pajak. Sedangkan bagi aparat pemerintahan, dia berharap agar memberikan contoh yang baik dalam membayar pajak, serta mendorong masyarakat untuk membayarkan pajak.

"Pajak merupakan pendukung pembangunan. Diharapkan membayar lebih awal, tidak perlu menunda pembayaran pada batas waktu terakhir. Pemerintah harus memberikan keteladanan," kata Titik.

Ia berharap, target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2014 bisa terlampaui. Sehingga hal tersebut bisa membuktikan bahwa warga Kota Yogyakarta adalah warga yang peduli dengan pembangunan. Dalam acara ini, Titik Sulastrri juga melakukan pembayaran pajak PBB di teller yang disediakan di Pendopo Balai Kota Yogyakarta. (dnh)

Berita	Sifat
<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005